

The Indonesian Navy's Strategic Concept to Address Threats in the Arafura Sea in the Context of Strengthening National Security

Konsep Strategi TNI Angkatan Laut Guna Menghadapi Ancaman di Laut Arafuru dalam Rangka Penguatan Keamanan Nasional

Ruben Tabuni¹, M.B. Pandjaitan², Ade Toshio Fadly³

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

¹rubentabuni14@gmail.com, ²pandjaitan2001@gmail.com, ³toshio5004@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian Navy's strategic concept in addressing threats in the Arafura Sea to strengthen national security. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study method through interviews, observations, and document analysis. Data analysis uses the Miles and Huberman model supported by NVivo 15 and complemented by SWOT analysis. The findings reveal that the Navy's strategy should focus on a risk-based approach by enhancing operational readiness of defense equipment and developing strategic bases to address surveillance limitations. The adoption of modern maritime technologies such as UAVs, satellites, radar systems, and artificial intelligence significantly improves early detection capabilities. Moreover, inter-agency synergy serves as a critical force multiplier in enhancing security effectiveness. Overall, the strategy is built upon three main pillars: strengthening defense equipment and bases, enhancing inter-agency collaboration, and accelerating maritime technology modernization. These findings highlight the need for a proactive and integrated strategy to address evolving threats in the Arafura Sea.

Keywords: Indonesian Navy Strategy, Maritime Security, Arafura Sea.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep strategi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di Laut Arafuru guna memperkuat keamanan nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta bantuan NVivo 15, dilengkapi analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi TNI AL perlu difokuskan pada pendekatan berbasis risiko melalui peningkatan kesiapan alutsista dan pembangunan pangkalan strategis untuk mengatasi keterbatasan pengawasan. Adopsi teknologi maritim modern seperti UAV, satelit, radar, dan kecerdasan buatan terbukti meningkatkan kemampuan deteksi dini secara signifikan. Selain itu, sinergitas antar instansi menjadi faktor kunci sebagai force multiplier dalam meningkatkan efektivitas pengamanan. Secara komprehensif, strategi TNI AL dibangun atas tiga pilar utama, yaitu penguatan alutsista dan pangkalan, peningkatan sinergi lintas lembaga, serta akselerasi modernisasi teknologi maritim. Temuan ini menegaskan perlunya strategi proaktif dan terintegrasi untuk menghadapi dinamika ancaman di kawasan Laut Arafuru.

Kata Kunci: Strategi TNI AL, Keamanan Maritim, Laut Arafuru.

1. Pendahuluan

Dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan Ketidakpastian global akibat rivalitas geopolitik mengakibatkan ketidakpastian keamanan maritim. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Laut menjadi arena perebutan pengaruh, baik terkait kebebasan navigasi, eksploitasi sumber daya, maupun kontrol jalur perdagangan internasional. Laut Arafuru, yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur pelayaran internasional yang

diakui oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*¹. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut rawan terhadap intervensi asing, baik dalam bentuk operasi militer terbuka maupun infiltrasi non-tradisional seperti intelijen dan pengawasan maritim. Pada level regional, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan menghadapi tantangan keamanan maritim yang signifikan. Aktivitas ilegal fishing oleh kapal asing, penyelundupan lintas negara, serta potensi konflik batas laut menjadi isu utama. Hubungan Indonesia dengan negara tetangga seperti Australia juga memiliki dimensi strategis, baik dalam bentuk kerja sama patroli maupun potensi gesekan kepentingan. Selain itu, Laut Arafuru menjadi titik rawan bagi infiltrasi kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan jalur laut untuk mobilisasi logistik dari luar negeri². Dengan demikian, strategi TNI Angkatan Laut di kawasan ini harus mengintegrasikan kerja sama regional (ASEAN, APEC, bilateral dengan Australia) sekaligus memperkuat kemampuan *deterrence* terhadap ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Pada tingkat nasional, Laut Arafuru memiliki arti penting bagi keamanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, terutama perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Papua dan Maluku. Namun di lain sisi ancaman terhadap keamanan laut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik dan militer. Infiltrasi separatis OPM melalui jalur laut berpotensi mengganggu stabilitas Papua, sementara keterbatasan alutsista dan pangkalan TNI AL di wilayah timur menjadi tantangan operasional yang nyata. Oleh karena itu, strategi TNI AL harus diarahkan pada penguatan pangkalan, modernisasi teknologi maritim, serta integrasi operasi dengan Bakamla, Polairud, dan TNI AU. Upaya ini akan mendukung terciptanya keamanan nasional yang berkelanjutan, menjaga kedaulatan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan maritim regional dan Internasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tiga jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diakui UNCLOS 1982 sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di laut. Salah satunya alur laut yang berbatasan dengan Australia dan negara-negara Pasifik adalah ALKI III yang merupakan jalur pelayaran internasional dari Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru, Australia hingga ke Samudra Pasifik. Papua Selatan dan Laut Arafuru adalah salah satu kawasan di ALKI III sebagai jalur laut internasional yang dilalui kapal dagang dan militer dari berbagai negara, termasuk Amerika dan Tiongkok. Australia sebagai sekutu Amerika memperkuat kehadiran militernya di utara, sehingga menambah tekanan geopolitik di sekitar Laut Arafuru. Di samping itu juga Tiongkok meningkatkan ekspansi maritimnya di wilayah Pasifik Selatan, dengan armada *blue water navy* yang mampu beroperasi jauh dari wilayah asal³.

Wilayah Papua selatan dan Laut Arafuru memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi Indonesia, baik dari aspek geopolitik, ekonomi, maupun pertahanan. Papua dikenal sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai objek vital nasional. Keberadaan objek vital nasional seperti PT Freeport Indonesia menambah urgensi pengamanan. Sementara itu Kawasan Laut Arafuru merupakan salah satu kawasan perikanan

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Part III tentang *Straits Used for International Navigation*

² Badan Intelijen Negara (BIN), *Laporan Keamanan Maritim Papua*, 2021

³ White House, *Indo-Pacific Strategy of the United States*, Washington D.C., 2022

terkaya di dunia, sekaligus menjadi jalur internasional ALKI III yang dilalui kapal dagang dan militer asing sekaligus jalur internasional ALKI III yang diakui UNCLOS 1982. Wilayah ini kerap menghadapi ancaman maritim seperti *illegal fishing*, penyelundupan, bahkan infiltrasi separatis OPM⁴. kondisi tersebut berimplikasi langsung pada strategi TNI Angkatan Laut di Kawasan tersebut. Selain itu, dinamika internasional memperlihatkan meningkatnya kehadiran kekuatan maritim negara lain di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Australia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Rivalitas geopolitik ini menuntut TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim juga mengantisipasi potensi spionase dan sabotase pihak asing terhadap jalur laut maupun objek vital nasional.

Dalam menghadapi dimensi politik dan keamanan yang kompleks di Papua dengan adanya keberadaan Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Meskipun basis utama OPM berada di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua, namun dinamika konflik juga berpotensi merambah ke wilayah pesisir dan laut. Jalur laut di Papua Selatan dan Laut Arafuru dapat menjadi rute infiltrasi, logistik, maupun komunikasi bagi kelompok separatis. Hal ini menambah kompleksitas ancaman yang dihadapi TNI Angkatan Laut karena selain menjaga kedaulatan maritim dari ancaman eksternal, mereka juga harus mengantisipasi potensi pemanfaatan laut oleh Gerakan separatis OPM⁵. Di sisi lain OPM juga mendapatkan simpati dari beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, yang secara politik mendukung isu Papua di forum internasional. Dukungan ini memperkuat dimensi transnasional konflik Papua. Gerakan separatis OPM kerap kali menjadikan Freeport sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Indonesia, dengan melakukan serangan bersenjata di sekitar wilayah operasional Perusahaan⁶. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas nasional, mengingat *Freeport* menyumbang pendapatan yang signifikan bagi negara. Dengan kondisi demikian menitikberatkan strategi TNI Angkatan Laut tidak hanya berorientasi pada keamanan fisik, tetapi juga harus memperhitungkan aspek diplomasi maritim dan kerja sama regional.

Strategi TNI Angkatan Laut di Papua Selatan dan Laut Arafuru memiliki relevansi langsung dengan Jalur laut di sekitar Papua yang berpotensi digunakan untuk penyelundupan senjata, infiltrasi logistik, maupun mobilisasi kelompok separatis yang dapat mengancam objek vital nasional seperti *Freeport*. Oleh karena itu, pengamanan maritim menjadi bagian integral dari perlindungan objek vital nasional. Selain itu, kondisi internasional juga memperkuat urgensi pengamanan *Freeport*. Sebagai perusahaan dengan investasi global, keamanan *Freeport* menjadi perhatian dunia. Gangguan terhadap operasional *Freeport* dapat berdampak pada stabilitas pasar mineral internasional, sehingga memperbesar dimensi geopolitik konflik Papua. Kawasan ini juga berdekatan dengan Australia, yang menjadikannya titik penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Australia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Laut Arafuru karena berbatasan dengan *Northern Territory* dan Teluk Carpentaria. Oleh karena itu, kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia, termasuk melalui latihan gabungan seperti *Exercise AUSINDO CORPAT*, menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan kawasan⁷.

⁴ Evan A. Laksmna, "Keamanan Maritim Indonesia dan Tantangan Separatisme," *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Vol. 10 No. 1, 2021

⁵ Muridan S. Widjojo, "Dinamika Konflik Papua dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional," *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Vol. 12 No. 1, 2022

⁶ International Crisis Group, *Indonesia: Dynamics of Conflict in Papua*, Asia Report No. 232, Jakarta/Brussels, 2021

⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Laporan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Australia*, Jakarta, 2024

Amerika Serikat sebagai kekuatan global memiliki kepentingan strategis di Indo-Pasifik melalui kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Amerika mendukung penguatan kapasitas maritim Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dari ancaman non-tradisional maupun rivalitas geopolitik dengan Tiongkok⁸. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama pertahanan, pelatihan militer, serta bantuan teknologi pengawasan maritim. Australia dan Amerika memiliki kepentingan terhadap stabilitas Papua karena potensi konflik dapat berdampak pada investasi global dan keamanan regional. Amerika, melalui kepentingan ekonominya di Freeport dapat menjadi alasan kuat untuk mendukung stabilitas Papua. Dengan demikian, strategi TNI Angkatan Laut di Papua Selatan dan Laut Arafuru tidak hanya berorientasi pada keamanan nasional, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika internasional, termasuk kerja sama dan ancaman tekanan geopolitik dari Australia dan Amerika Serikat.

Kondisi saat ini menuntut kehadiran TNI Angkatan Laut secara intensif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim di Kawasan tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan alutsista dan sarana pengawasan. TNI Angkatan Laut masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan operasional dengan ketersediaan alutsista modern. Kapal patroli yang ada sering kali berusia tua, radar pengawasan belum sepenuhnya mencakup wilayah perbatasan, dan sistem deteksi maritim masih terbatas⁹. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap ancaman seperti *illegal fishing*, penyelundupan, infiltrasi kelompok separatis OPM, serta potensi gangguan terhadap objek vital nasional seperti PT Freeport Indonesia. Keterbatasan pengawasan juga diperparah oleh luasnya Laut Arafuru yang menjadi salah satu jalur perikanan internasional. Kapal asing sering memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk melakukan penangkapan ikan ilegal. Di sisi lain, jalur laut Papua Selatan dapat digunakan sebagai rute logistik oleh kelompok separatis, sehingga menambah kompleksitas ancaman.

Dalam konteks Kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, keterbatasan alutsista Indonesia menjadi perhatian karena kawasan Indo-Pasifik saat ini mengalami rivalitas geopolitik yang intens. Australia dan Amerika Serikat mendorong kerja sama keamanan maritim dengan Indonesia, termasuk melalui pelatihan, bantuan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Namun, ketergantungan pada kerja sama luar negeri juga bisa menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kemandirian pertahanan nasional¹⁰. Kompleksitas ancaman ini tidak dapat ditangani oleh TNI Angkatan Laut secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergitas antar instansi dalam kerangka pertahanan dan keamanan nasional. Sinergitas antar instansi sangat dibutuhkan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan pertahanan laut dapat bersinergi dengan Bakamla dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim, serta Polri dalam penanganan aspek kriminal dan separatisme. Selain itu menjalin Kerjasama dengan Pemerintah daerah dan masyarakat pesisir sebagai mitra dalam deteksi dini dan mewujudkan stabilitas sosial. Sinergitas ini menjadi semakin penting karena keterbatasan alutsista dan pengawasan TNI Angkatan Laut di wilayah timur Indonesia. Dengan luasnya Laut Arafuru dan intensitas lalu lintas kapal asing di ALKI III, pengamanan tidak mungkin dilakukan secara eksklusif oleh satu instansi. Oleh karena itu, integrasi operasi, berbagi informasi intelijen, serta koordinasi lintas sektor

⁸ U.S. Department of Defense, *Annual Report on the Indo-Pacific Strategy*, Washington D.C., 2023

⁹ TNI Angkatan Laut, *Berita Utama Operasi dan Latihan TNI AL*, 2026

¹⁰ Joint Statement on the Ninth Australia-Indonesia Foreign and Defence Ministers' 2+2 Meeting, Canberra, 28 Agustus 2025

menjadi kunci keberhasilan strategi keamanan maritim di Papua. Selain itu, kerja sama internasional dengan Australia dan Amerika Serikat juga dapat diperkuat melalui sinergitas antar instansi, sehingga Indonesia mampu menjaga kedaulatan sekaligus memenuhi komitmen regional dalam kerangka Indo-Pasifik.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana strategi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di Laut Arafuru dalam rangka penguatan Keamanan Nasional. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan Keamanan Nasional, serta sejauh mana sinergitas antara TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polri, dan instansi lainnya dapat dioptimalkan dalam rangka menghadapi ancaman di Laut Arafuru. Sejalan dengan urgensi tersebut, kajian ini disusun dalam suatu penelitian dengan judul "Strategi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di Laut Arafuru dalam rangka penguatan Keamanan Nasional

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keamanan Nasional

Teori keamanan nasional memberikan kerangka untuk melihat hubungan antara ancaman eksternal dan internal terhadap stabilitas negara. Salah satu pemikir utama dalam studi keamanan internasional adalah Barry Buzan. Ia menekankan bahwa keamanan merupakan derivasi dari *power* dan membagi kondisi keamanan menjadi yang berdiri sendiri serta yang terkait dengan sistem internasional¹¹. Pemikirannya banyak memengaruhi paradigma keamanan komprehensif. Menurut Kenneth Waltz yang dikenal sebagai tokoh utama dalam hubungan internasional, keamanan nasional tidak semata ditentukan oleh sifat manusia atau kebijakan domestik, melainkan oleh struktur sistem internasional yang bersifat anarkis¹². Dalam pandangannya, negara adalah aktor utama yang beroperasi dalam sistem tanpa otoritas pusat, sehingga mereka harus memprioritaskan survival dengan cara mengakumulasi kekuatan dan menjaga keseimbangan kekuasaan (*balance of power*). teori Waltz menekankan bahwa keamanan nasional bergantung pada posisi relatif suatu negara dalam sistem internasional dan kemampuan mempertahankan diri dari ancaman eksternal melalui strategi pertahanan.

Teori Daya Gentar (*Deterrence Theory*)

Glenn Snyder menekankan konsep *deterrence by punishment* (menakut-nakuti lawan dengan konsekuensi besar) dan *deterrence by denial* (mencegah lawan mencapai tujuannya). Dideskripsikan bahwa kekuatan militer modern, terutama yang memiliki daya hancur besar, berfungsi sebagai alat untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*)¹³. Negara tidak perlu menggunakannya secara nyata. Thomas Schelling ahli strategi juga menekankan bahwa kekuatan militer, khususnya senjata nuklir, digunakan bukan untuk berperang tetapi untuk *mencegah* perang. Ia menegaskan bahwa ancaman yang kredibel dapat mengubah perilaku lawan. Negara tidak perlu menggunakannya secara nyata, cukup dengan menunjukkan kemampuan dan kesediaan untuk merespons, sehingga lawan enggan melakukan agresi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa strategi menggunakan peralatan modern dapat

¹¹ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, London: Harvester Wheatsheaf, 1991, hlm. 18–20

¹² Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1979, hlm. 88–93.

¹³ Snyder, G. H. (1961). *Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security*. Princeton University Press.

menunjukkan kemampuan dan kekuatan negara sehingga lawan akan mengurangi serta membatalkan niatnya. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana strategi TNI Angkatan Laut dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi maritim modern (*drone* laut, *drone* udara dan sistem radar terintegrasi) untuk mendukung operasi pengamanan di Kawasan Laut Arafuru.

Teori Sea Power

Konsep Sea Power diperkenalkan oleh Alfred Thayer Mahan pada akhir abad ke-19 melalui karyanya *The Influence of Sea Power upon History*. Mahan berpendapat bahwa kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya menguasai laut. Laut dianggap sebagai jalur vital perdagangan, logistik, dan proyeksi kekuatan militer. Negara yang memiliki armada laut modern, pangkalan strategis, serta kemampuan mengendalikan jalur perdagangan internasional akan memiliki pengaruh besar dalam politik global dan mampu menjaga kepentingan nasionalnya.

Mahan menekankan beberapa faktor utama pembentuk sea power adalah posisi geografis yang strategis, keberadaan pelabuhan dan pangkalan yang memadai, kekuatan armada laut, akses terhadap sumber daya maritim, serta dukungan masyarakat terhadap pembangunan kekuatan laut¹⁴. Kombinasi faktor tersebut memungkinkan sebuah negara untuk menguasai laut dan memperkuat daya tawarnya di tingkat internasional.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Laut Arafuru, teori ini sangat relevan. Kawasan tersebut merupakan bagian dari jalur ALKI III yang diakui UNCLOS sebagai rute pelayaran internasional. Posisi geografisnya menjadikan Laut Arafuru penting bagi perdagangan global sekaligus rawan terhadap ancaman, baik dari infiltrasi separatis OPM maupun potensi intervensi militer asing. Dengan mengacu pada teori Mahan, TNI Angkatan Laut perlu memperkuat pangkalan di wilayah timur, meningkatkan modernisasi alutsista, serta mengoptimalkan penguasaan jalur laut strategis¹⁵. Langkah ini tidak hanya menjaga keamanan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan regional Indo-Pasifik. Dengan demikian teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu dengan meningkatkan gelar kemampuan unsur dan penguasaan kawasan maritim dengan maksimal dapat mengoptimalkan keamanan nasional di kawasan,

Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional menekankan bahwa dinamika politik global tidak hanya dibentuk oleh faktor material seperti kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh aspek sosial yang lahir dari interaksi antarnegara. Identitas, norma, dan nilai yang berkembang dalam masyarakat internasional menjadi elemen penting yang memengaruhi perilaku negara. Alexander Wendt, tokoh utama konstruktivisme, berpendapat bahwa kondisi anarki dalam sistem internasional tidak otomatis menimbulkan konflik, melainkan bergantung pada bagaimana negara memaknai dan merespons situasi tersebut¹⁶. Dalam konteks pertahanan maritim, konstruktivisme menjelaskan bahwa strategi suatu negara tidak

¹⁴ Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, London: Routledge, 2013

¹⁵ Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*, Boston: Little, Brown and Company, 1890, hlm. 25–30; lihat juga United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, Pasal 53 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

¹⁶ Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425

hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang atau pangkalan laut, tetapi juga oleh bagaimana negara tersebut membangun citra, memperkuat legitimasi, serta menegakkan norma kerja sama regional. Stephen R. Covey juga dengan teori sinergitasnya juga mendefinisikan bahwa sinergitas sebagai kerja sama yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga menghasilkan hasil yang lebih optimal dibandingkan jika dilakukan secara terpisah¹⁷. Dengan demikian teori-teori ini memberikan perspektif bahwa keamanan laut sangat dipengaruhi oleh persepsi, identitas diri dan bersinergi dalam mencapai tujuan yang besar. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana TNI AL dapat berkolaborasi dengan instansi lain untuk mewujudkan suatu pola strategi yang besar dengan cara membangun kerjasama dalam menggunakan aset tiap tiap instansi. Maka dengan demikian pelaksanaan operasi akan lebih efektif dan efisien guna mewujudkan keamanan nasional yang optimal.

Perkembangan Lingkungan Strategis

Secara regional Laut Arafuru memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Australia dan menjadi bagian dari jalur lintas internasional ALKI III. Hal ini menjadikan kawasan tersebut rawan terhadap aktivitas illegal fishing oleh kapal asing, penyelundupan lintas negara, serta potensi konflik perbatasan. Hubungan bilateral dengan Australia juga memengaruhi dinamika keamanan di kawasan ini, baik dalam bentuk kerja sama maupun potensi gesekan terkait pengelolaan sumber daya laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut harus memperkuat kehadiran operasional dan menjalin sinergi dengan aparat keamanan lain untuk mengantisipasi ancaman regional.

Secara nasional laut arafuru merupakan sumber kekayaan alam nasional. Dari segi geografis Laut Arafura berfungsi sebagai koridor maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Papua serta jalur perdagangan global melalui Laut Banda dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikannya vital bagi keamanan nasional dan ekonomi, karena kapal-kapal yang membawa konsentrat tembaga dan emas dari Freeport melewati kawasan tersebut untuk diekspor. Sehingga bukan hanya sekadar jalur pelayaran, tetapi juga titik strategis yang menghubungkan kepentingan ekonomi (ekspor tambang Freeport), keamanan maritim, dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia¹⁸.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di kawasan Laut Arafuru, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan) serta dibantu perangkat lunak NVivo 15 untuk pengkodean tematik dan triangulasi data. Unit analisis berfokus pada strategi operasi, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi terhadap

¹⁷ Stephen R. Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People*, definisi sinergi sebagai kerja sama yang saling melengkapi untuk hasil lebih optimal

¹⁸ Lihat Freeport-McMoRan, *Annual Report 2020*, Phoenix: Freeport-McMoRan Inc., 2020, hlm. 45-47; serta Riza Sihbudi, *Dinamika Keamanan Maritim Indonesia: Tantangan dan Strategi*, Jakarta: LIPI Press, 2018, hlm. 112-115.

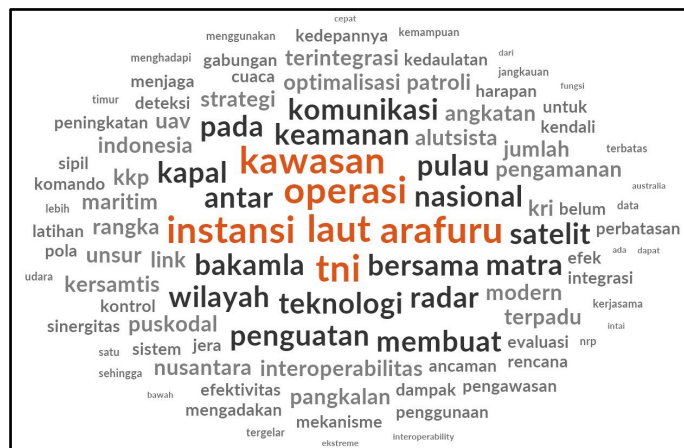
keamanan maritim, yang dikaji secara holistik dalam kerangka teori pertahanan dan keamanan. Penelitian dilaksanakan pada Februari–Mei 2026 di beberapa lokasi strategis seperti Mabes TNI AL dan Koarmada, dengan sumber data berupa data primer dari wawancara mendalam menggunakan purposive sampling serta data sekunder dari dokumen resmi, kebijakan, dan literatur terkait, guna menghasilkan analisis komprehensif tentang efektivitas dan tantangan strategi TNI AL dalam memperkuat keamanan nasional.

4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data

Analisis Data Nvivo

Analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo menghasilkan tiga tema utama yang merepresentasikan dimensi-dimensi kritis dalam strategi keamanan TNI AL di Laut Arafuru. Ketiga tema ini masing-masing memiliki sub-node yang menggambarkan aspek-aspek spesifik dari setiap dimensi, serta dikodekan dari pernyataan-pernyataan ketiga narasumber penelitian. Visualisasi NVivo menunjukkan keterkaitan yang erat antara ketiga tema tersebut, yang secara kolektif membentuk kerangka konseptual strategi pengamanan maritim yang komprehensif dan terintegrasi.



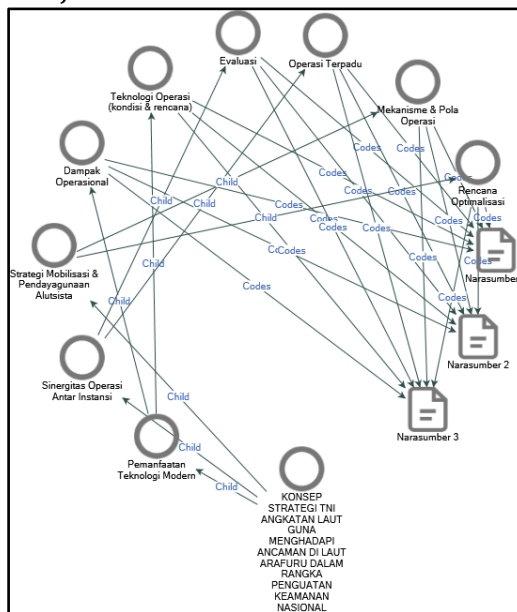
Gambar 1. Word Cloud Hasil Analisis Nvivo

Word cloud tersebut merupakan representasi visual dari frekuensi kata-kata yang paling sering muncul yang membahas keamanan maritim. Kata-kata dengan ukuran paling besar dan berwarna mencolok seperti kawasan, operasi, instansi, laut arafuru, dan tni, menjadi inti dari keseluruhan pembahasan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada upaya pengamanan dan pengendalian operasi militer di kawasan Laut Arafuru, sebuah wilayah perairan strategis di bagian timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Kata kedaulatan dan nasional yang juga muncul memperkuat bahwa isu ini dipandang sebagai persoalan keutuhan dan kedaulatan negara, bukan sekadar operasi rutin.

Kelompok kata berikutnya yang berukuran sedang, seperti radar, satelit, komunikasi, teknologi, alutsista, kapal, uav, dan puskodal, menggambarkan dimensi teknologi dan infrastruktur pertahanan yang menjadi fokus pembahasan. Ini mengindikasikan bahwa penelitian menganalisis secara mendalam kesiapan dan kapabilitas sistem senjata, alat penginderaan, serta sistem komando dan pengendalian yang dimiliki TNI dalam mengawasi kawasan Laut Arafuru. Kata-kata seperti

penguatan, peningkatan, modern, dan teknologi menunjukkan adanya rekomendasi untuk memperkuat dan memodernisasi peralatan serta sistem yang ada, mengingat masih terdapatnya keterbatasan (terbatas, belum) dalam kapasitas pengawasan wilayah tersebut saat ini.

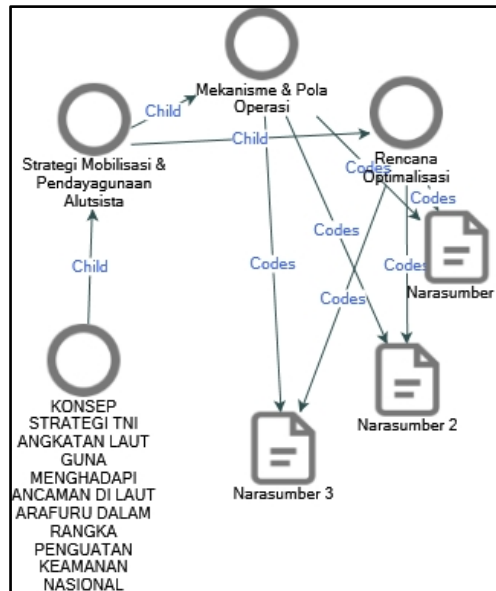
Kata-kata seperti interoperabilitas, sinergitas, kersamtis, bakamla, kkp, bersama, antar, dan matra mengungkapkan dimensi ketiga dari penelitian ini, yaitu pentingnya koordinasi dan sinergi lintas instansi dan matra. Penelitian ini tampaknya tidak hanya membahas peran TNI secara mandiri, tetapi juga menekankan perlunya kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Bakamla, KKP, dan unsur sipil lainnya dalam sebuah sistem terpadu. Kata mekanisme, pola, rangka, rencana, dan evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa kerangka mekanisme kerja sama yang konkret dan terstruktur, guna meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan Laut Arafuru secara komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 2. Diagram Keseluruhan Node Nvivo

Gambar tersebut merupakan sebuah peta konsep (concept map) atau jaringan kodifikasi data kualitatif yang menggambarkan struktur penelitian Mayor Ruben. Inti dari seluruh peta ini adalah node utama di bagian bawah bertuliskan "Konsep Strategi TNI Angkatan Laut Guna Menghadapi Ancaman di Laut Arafuru dalam Rangka Penguatan Keamanan Nasional", yang menjadi fokus dan tujuan akhir dari keseluruhan penelitian. Dari node utama ini, terhubung beberapa tema/kategori besar yang masing-masing direpresentasikan oleh lingkaran abu-abu, yaitu: Evaluasi, Operasi Terpadu, Mekanisme & Pola Operasi, Teknologi Operasi (kondisi & rencana), Dampak Operasional, Strategi Mobilisasi & Pendayagunaan Alutsista, Sinergitas Operasi Antar Instansi, dan Pemanfaatan Teknologi Modern. Kategori-kategori ini merupakan tema-tema pokok yang dibahas dalam penelitian untuk membangun konsep strategi yang dimaksud.

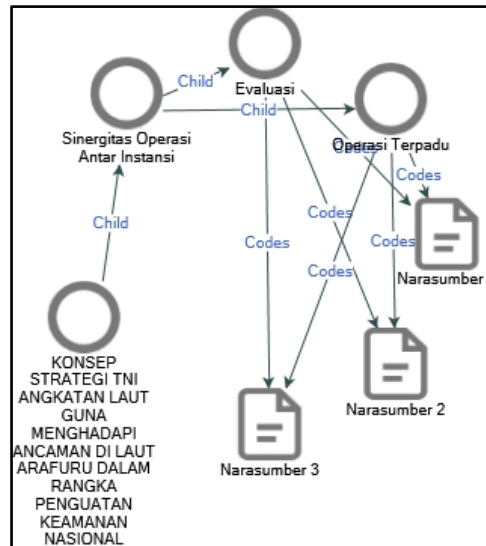
a. Strategi Mobilisasi dan Pendayagunaan Alutsista



Gambar 3. Node NVivo: Strategi Mobilisasi dan Pendayagunaan Alutsista

Tema pertama hasil analisis NVivo adalah Strategi Mobilisasi dan Pendayagunaan Alutsista, yang mencakup dua sub-node utama yaitu Mekanisme dan Pola Operasi serta Rencana Optimalisasi. Berdasarkan koding dari ketiga narasumber, ditemukan bahwa TNI AL saat ini menghadapi keterbatasan signifikan dalam hal jumlah kapal perang dan wahana udara yang beroperasi secara reguler di kawasan Laut Arafuru. Mekanisme rotasi dan pola operasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kehadiran TNI AL secara konsisten di seluruh titik-titik rawan kawasan tersebut. Narasumber secara konsisten menyebutkan bahwa pola patroli yang ada perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan faktor cuaca, keterbatasan jangkauan, dan prioritas ancaman yang dinamis di kawasan ini. Dari analisis mendalam terhadap koding NVivo tema pertama, diperoleh temuan bahwa efektivitas mobilisasi dan pendayagunaan alutsista secara signifikan dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling berkaitan: ketersediaan pangkalan yang memadai sebagai titik dukungan logistik dan perawatan, kesiapan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam operasi maritim di perairan timur, serta ketersediaan anggaran operasional yang cukup untuk mendukung intensitas patroli yang diperlukan. Temuan ini sejalan dengan kerangka teoritis konsep Sea Power yang dikemukakan oleh Mahan, yang menekankan bahwa kekuatan laut yang efektif tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kualitas kapal perang, tetapi juga oleh jaringan pangkalan, logistik, dan kemampuan proyeksi kekuatan yang memadai ke seluruh wilayah perairan nasional.

b. Sinergitas Operasi Antar Instansi



Gambar 4. Node NVivo: Sinergitas Operasi Antar Instansi

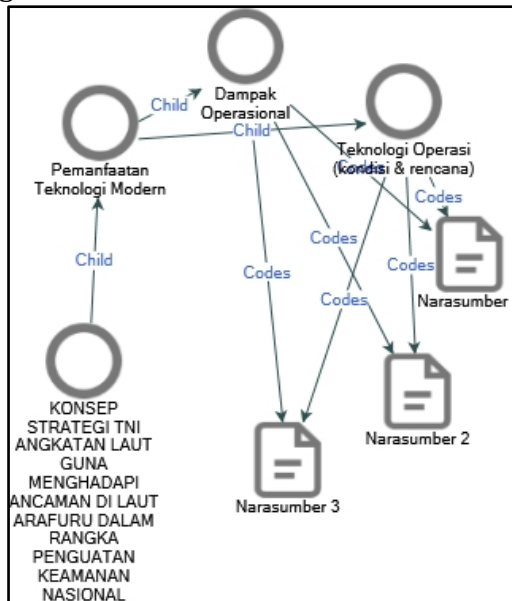
Tema kedua analisis NVivo adalah Sinergitas Operasi Antar Instansi, yang mencakup sub-node Evaluasi dan Operasi Terpadu. Dari koding terhadap pernyataan ketiga narasumber, ditemukan bahwa mekanisme koordinasi antar instansi di kawasan Laut Arafuru masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural yang signifikan. Meskipun telah terdapat forum koordinasi dan mekanisme komunikasi lintas lembaga, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal akibat perbedaan prosedur operasional baku (SOP), perbedaan sistem komunikasi dan teknologi yang digunakan, serta ketidakjelasan kewenangan dan pembagian tanggung jawab operasional di antara instansi yang terlibat. Kondisi ini menghambat respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap ancaman yang bersifat dinamis di kawasan Laut Arafuru.

Sub-node Operasi Terpadu dalam analisis NVivo mengungkapkan bahwa pengalaman pelaksanaan operasi gabungan antara TNI AL dengan Bakamla, Polairud, dan KKP selama ini masih bersifat insidental dan belum terstruktur dalam format yang permanen dan berkesinambungan. Para narasumber secara umum menekankan perlunya pembentukan mekanisme operasi terpadu yang lebih formal, terstruktur, dan berkelanjutan dengan kepemimpinan yang jelas serta prosedur koordinasi yang terstandarisasi. Pembentukan suatu joint task force atau gugus tugas bersama yang melibatkan seluruh instansi terkait dinilai sebagai langkah strategis yang paling efektif untuk meningkatkan sinergitas operasi di kawasan Laut Arafuru, mengingat kompleksitas ancaman yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu instansi secara mandiri.

Temuan NVivo pada tema kedua ini secara konsisten menunjukkan bahwa penguatan sinergitas antar instansi merupakan faktor multiplier yang paling kritis dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Laut Arafuru. Evaluasi terhadap pelaksanaan operasi yang telah berjalan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara TNI AL sebagai leading sector dengan unsur-unsur Bakamla, Polairud, dan KKP dapat meningkatkan cakupan pengawasan, memperpendek waktu respons terhadap insiden, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Keberhasilan operasi Kersamtis (Kerja Sama Maritim Instansi) yang telah diimplementasikan sebelumnya menjadi bukti empiris bahwa sinergi lintas

lembaga dapat menghasilkan efek deterrence yang signifikan terhadap berbagai bentuk ancaman di kawasan Laut Arafuru dan sekitarnya.

c. Pemanfaatan Teknologi Maritim Modern



Gambar 4. Node NVivo: Pemanfaatan Teknologi Modern

Tema ketiga analisis NVivo adalah Pemanfaatan Teknologi Maritim Modern, yang mencakup sub-node Teknologi Operasi (kondisi dan rencana) dan Dampak Operasional. Analisis terhadap koding dari ketiga narasumber mengungkapkan bahwa kondisi teknologi pengawasan maritim yang saat ini dimiliki TNI AL di kawasan Laut Arafuru masih jauh dari memadai untuk menjamin pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh perairan yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem radar pantai yang ada memiliki jangkauan terbatas, sementara cakupan satelit maritim masih bersifat parsial dan tidak kontinu. Pemanfaatan wahana nirawak (UAV) untuk pengintaian dan pengawasan maritim masih sangat terbatas, meskipun teknologi ini terbukti sangat efektif dalam memperluas jangkauan pemantauan dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan patroli menggunakan kapal atau pesawat berawak.

Analisis sub-node Dampak Operasional menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi maritim modern yang tepat guna dapat menghasilkan multiplier effect yang sangat signifikan terhadap efektivitas operasi TNI AL di Laut Arafuru. Studi kasus dari operasi yang mengintegrasikan data satelit dan UAV dengan sistem komando dan kendali terintegrasi menunjukkan peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap kapal asing yang mencurigakan hingga 300% dibandingkan dengan patroli konvensional semata. Selain itu, teknologi Automatic Identification System (AIS) yang diintegrasikan dengan sistem pengawasan radar dan satelit memungkinkan TNI AL untuk memantau pergerakan kapal secara real-time di seluruh kawasan Laut Arafuru, sehingga potensi deteksi kapal yang mencoba menghindari pengawasan dapat ditingkatkan secara dramatis. Temuan ini menegaskan bahwa modernisasi teknologi maritim bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan strategis bagi TNI AL dalam menghadapi tantangan pengamanan di kawasan Laut Arafuru yang semakin kompleks.

Analisis Data SWOT

IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

Analisis faktor internal (IFAS) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama TNI AL dalam konteks pengamanan Laut Arafuru. Faktor kekuatan meliputi: (S1) kemampuan operasi matra laut TNI AL yang terlatih dengan pengalaman operasi di perairan timur yang cukup signifikan; (S2) keberadaan pangkalan TNI AL yang strategis di wilayah timur, khususnya di Sorong dan Merauke, yang berfungsi sebagai basis operasional; (S3) komitmen sinergitas antar instansi yang telah terjalin antara TNI AL dengan Bakamla, Polairud, dan KKP dalam berbagai operasi bersama; serta (S4) pengalaman dan rekam jejak dalam pelaksanaan operasi gabungan dan patroli bersama di kawasan timur Indonesia. Keempat kekuatan ini memberikan fondasi yang cukup kuat bagi pengembangan strategi pengamanan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Faktor kelemahan yang teridentifikasi mencakup: (W1) keterbatasan jumlah dan kesiapan operasional alutsista yang dioperasikan di kawasan Laut Arafuru, yang tidak sebanding dengan luasnya perairan yang harus diawasi; (W2) jangkauan sistem radar pantai dan pengawasan maritim yang belum optimal sehingga meninggalkan sejumlah blind spot di kawasan rawan; (W3) perbedaan dan ketidakseragaman SOP antar instansi yang menghambat koordinasi dan respons operasional yang cepat; serta (W4) keterbatasan infrastruktur logistik dan fasilitas pendukung pangkalan di wilayah timur yang mempengaruhi kesiapan dan sustaining power operasi. Pembobotan terhadap seluruh faktor IFAS menghasilkan skor total sebesar 2,75 dengan selisih S-W sebesar +1,25, yang menunjukkan bahwa TNI AL memiliki keunggulan faktor internal yang cukup signifikan meskipun masih terdapat kelemahan yang memerlukan perhatian serius.

Implikasi dari hasil analisis IFAS menunjukkan bahwa TNI AL berada dalam posisi yang relatif kuat dari sisi faktor internal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengamanan yang lebih proaktif di Laut Arafuru. Namun demikian, kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi, terutama keterbatasan alutsista dan infrastruktur, harus menjadi prioritas penanganan jangka pendek dan menengah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas strategi yang dirumuskan. Selisih positif S-W sebesar +1,25 menunjukkan bahwa kekuatan internal yang dimiliki TNI AL cukup untuk menjadi modal dasar dalam mengatasi kelemahan yang ada, dengan syarat adanya komitmen kelembagaan dan dukungan anggaran yang konsisten dari pemerintah pusat untuk mendukung transformasi kapabilitas TNI AL di kawasan timur Indonesia.

Tabel 1. Matriks IFAS Strategi Pengamanan Laut Arafuru

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
KEKUATAN (Strengths)				
S1. Kemampuan operasi matra laut TNI AL yang terlatih	0,20	4	0,80	Sangat unggul
S2. Adanya pangkalan TNI AL di wilayah timur (Sorong, Merauke)	0,15	3	0,45	Cukup memadai
S3. Komitmen sinergitas antar instansi (Bakamla, Polairud, KKP)	0,15	3	0,45	Berkembang
S4. Pengalaman operasi gabungan dan patroli bersama	0,10	3	0,30	Efektif
Sub Total Kekuatan	0,60		2,00	

KELEMAHAN (Weaknesses)				
W1. Keterbatasan jumlah dan kesiapan alutsista di kawasan	0,15	2	0,30	Perlu penguatan
W2. Jangkauan radar dan pengawasan belum optimal	0,10	2	0,20	Terbatas
W3. Perbedaan SOP antar instansi yang belum terstandarisasi	0,10	2	0,20	Menghambat sinergi
W4. Terbatasnya infrastruktur logistik dan pangkalan di timur	0,05	1	0,05	Kritis
Sub Total Kelemahan	0,40		0,75	
TOTAL IFAS (S-W = +1,25)	1,00		2,75	Posisi Kuat

EFAS (External Factor Analysis Summary)

Analisis faktor eksternal (EFAS) mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi TNI AL dalam upaya pengamanan Laut Arafuru. Faktor peluang yang teridentifikasi mencakup: (O1) tersedianya kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim yang dikuatkan melalui Deklarasi Sydney 2024, yang membuka peluang pertukaran intelijen dan latihan bersama yang lebih intensif; (O2) perkembangan teknologi maritim yang pesat, khususnya dalam bidang satelit, UAV, dan sistem radar modern yang semakin terjangkau dan mudah diintegrasikan; (O3) kebijakan pemerintah yang secara konsisten memprioritaskan penguatan pertahanan maritim sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional; serta (O4) tersedianya forum kerja sama maritim regional melalui ASEAN dan mekanisme bilateral yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pengamanan nasional. Keempat peluang ini secara kolektif menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif bagi pengembangan kapabilitas TNI AL di kawasan Laut Arafuru.

Faktor ancaman yang harus diantisipasi mencakup: (T1) intensifikasi aktivitas illegal fishing oleh kapal-kapal asing yang semakin sophisticated dalam menghindari pengawasan maritim, yang merugikan negara baik secara ekonomi maupun dari segi kedaulatan; (T2) ancaman infiltrasi kelompok separatis OPM melalui jalur laut yang menggunakan teknologi komunikasi modern untuk koordinasi dan mengeksploitasi keterbatasan patroli TNI AL; serta (T3) meningkatnya kehadiran dan aktivitas militer kekuatan asing di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menciptakan dilema keamanan bagi Indonesia, khususnya di perairan ALKI III yang merupakan jalur strategis internasional. Pembobotan terhadap seluruh faktor EFAS menghasilkan skor total sebesar 3,30 dengan selisih O-T sebesar +1,40, yang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal secara keseluruhan lebih memberikan peluang daripada ancaman bagi pengembangan strategi pengamanan TNI AL di Laut Arafuru.

Interpretasi hasil analisis EFAS menunjukkan bahwa TNI AL berada dalam situasi eksternal yang relatif menguntungkan untuk melaksanakan transformasi kapabilitas dan pengembangan strategi pengamanan yang lebih komprehensif di Laut Arafuru. Selisih positif O-T sebesar +1,40 mencerminkan bahwa peluang yang tersedia, terutama dalam hal kerja sama bilateral dan perkembangan teknologi, jauh lebih besar dibandingkan ancaman yang harus dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus strategi harus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan peluang yang ada secara proaktif dan inovatif, sekaligus membangun kapasitas dan mekanisme yang memadai untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Hasil EFAS ini juga mengindikasikan pentingnya engagement diplomatik

dan kerja sama internasional sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari strategi pengamanan maritim Indonesia di kawasan Laut Arafuru.

Tabel 2. Matriks EFAS Strategi Pengamanan Laut Arafuru

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
PELUANG (Opportunities)				
O1. Kerja sama bilateral Indonesia-Australia (Deklarasi Sydney 2024)	0,20	4	0,80	Sangat strategis
O2. Perkembangan teknologi satelit, UAV dan radar maritim	0,20	4	0,80	Peluang besar
O3. Kebijakan pemerintah penguatan pertahanan maritim	0,15	3	0,45	Mendukung
O4. Dukungan ASEAN dan forum maritim regional	0,10	3	0,30	Kondusif
Sub Total Peluang	0,65		2,35	
ANCAMAN (Threats)				
T1. Intensifikasi illegal fishing oleh kapal asing	0,15	3	0,45	Ancaman nyata
T2. Infiltrasi OPM dan kelompok separatis melalui jalur laut	0,10	3	0,30	Ancaman serius
T3. Meningkatnya kehadiran militer asing di kawasan Indo-Pasifik	0,10	2	0,20	Perlu diwaspadai
Sub Total Ancaman	0,35		0,95	
TOTAL EFAS (O-T = +1,40)	1,00		3,30	Posisi Unggul

Matriks SWOT dan Posisi Strategis

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS, diperoleh koordinat posisi strategis TNI AL dalam diagram kuadran SWOT dengan nilai $X = +1,25$ (selisih S-W) dan $Y = +1,40$ (selisih O-T). Koordinat ini menempatkan posisi TNI AL pada Kuadran I (Growth/Aggressive Strategy), yang mengindikasikan bahwa TNI AL memiliki kekuatan internal yang cukup ($S > W$) sekaligus beroperasi dalam lingkungan eksternal yang secara keseluruhan kondusif ($O > T$). Posisi pada Kuadran I merupakan posisi yang paling menguntungkan karena TNI AL dapat mengembangkan strategi yang berorientasi pertumbuhan dan agresif dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Strategi utama yang direkomendasikan pada posisi ini adalah strategi SO (Strengths-Opportunities), yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang secara maksimal.

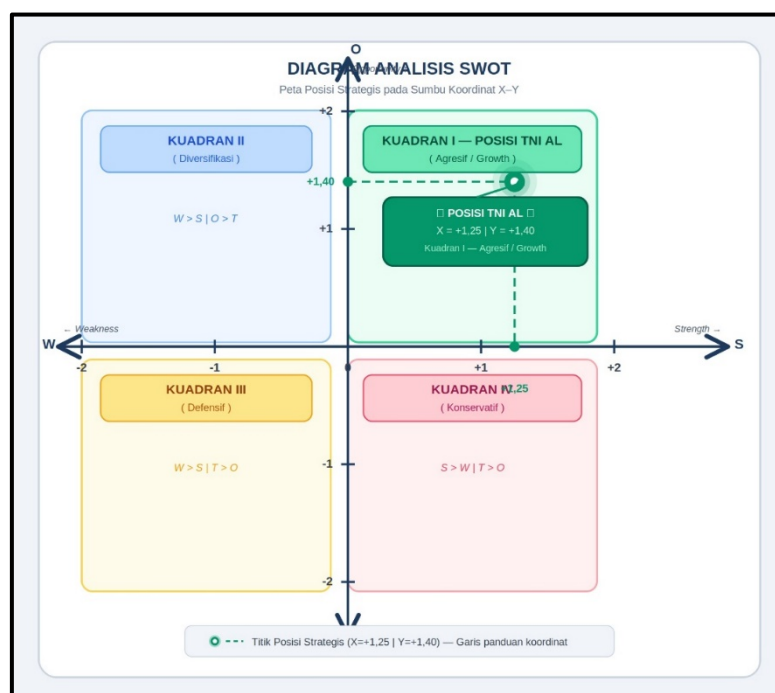
Matriks SWOT yang dikembangkan berdasarkan analisis ini menghasilkan empat strategi generik: (1) Strategi SO, yaitu mengoptimalkan kemampuan operasi TNI AL dan kerja sama antar instansi untuk memanfaatkan peluang kerja sama bilateral dengan Australia dan pengembangan teknologi maritim; (2) Strategi WO, yaitu mengatasi keterbatasan alutsista dan infrastruktur dengan memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah dan kerja sama internasional; (3) Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan operasi gabungan dan pengalaman TNI AL untuk menghadapi ancaman illegal fishing, infiltrasi OPM, dan kehadiran militer asing; serta (4) Strategi WT, yaitu memperbaiki kelemahan SOP dan koordinasi untuk meminimalkan kerentanan terhadap ancaman yang ada. Keempat strategi ini secara kolektif

membentuk kerangka strategi komprehensif yang dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

Visualisasi diagram kuadran SWOT menempatkan posisi strategis TNI AL di kuadran kanan atas (Kuadran I), yang secara konsisten mengindikasikan bahwa rekomendasi strategi yang paling tepat adalah strategi pertumbuhan (growth strategy) atau strategi ofensif. Dalam konteks pengamanan Laut Arafuru, strategi ofensif ini diwujudkan melalui tiga pilar utama yang saling mendukung dan melengkapi: pertama, penguatan dan modernisasi kapabilitas alutsista secara proaktif; kedua, pembangunan mekanisme sinergi operasional antar instansi yang lebih permanen dan terstruktur; serta ketiga, akselerasi adopsi dan integrasi teknologi maritim modern dalam seluruh aspek operasi pengamanan. Ketiga pilar ini akan dijabarkan secara lebih rinci dalam rumusan kebijakan, strategi, dan upaya pada bagian selanjutnya dari bab ini.

Tabel 3. Matriks SWOT Strategi Pengamanan TNI AL di Laut Arafuru

SWOT	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O)	Strategi SO (Agresif): Optimalkan alutsista dan kerja sama teknologi AU/Bakamla memanfaatkan peluang kerja sama bilateral Australia dan penguatan kebijakan nasional.	Strategi WO (Pembenahan): Tingkatkan infrastruktur pangkalan dan perbedaan SOP antar instansi dengan memanfaatkan dukungan anggaran pertahanan dan teknologi satelit.
THREATS (T)	Strategi ST (Diversifikasi): Gunakan kekuatan operasi gabungan TNI AL-AU-Bakamla untuk menghadapi ancaman illegal fishing, infiltrasi OPM dan kehadiran militer asing.	Strategi WT (Defensif): Perkuat regulasi dan perbedaan SOP antar instansi untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman di tengah keterbatasan alutsista.



Gambar 5. Diagram Kuadran SWOT Posisi Strategis TNI AL di Laut Arafuru

Diagram di atas merupakan visualisasi analisis SWOT dalam sistem koordinat kartesius dua dimensi, di mana sumbu horizontal (X) merepresentasikan faktor internal dari Weakness (W) di sisi kiri hingga Strength (S) di sisi kanan sementara sumbu vertikal (Y) merepresentasikan faktor eksternal dari Threat (T) di bagian bawah hingga Opportunity (O) di bagian atas. Skala kedua sumbu berkisar dari -2 hingga +2, membentuk empat kuadran strategis yang masing-masing mencerminkan kondisi organisasi yang berbeda-beda.

Keempat kuadran tersebut adalah: Kuadran I (Agresif/Growth) di kanan atas, menandakan kekuatan lebih besar dari kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman; Kuadran II (Diversifikasi) di kiri atas, di mana peluang besar namun kekuatan internal masih lemah; Kuadran III (Defensif) di kiri bawah, kondisi paling kritis karena kelemahan dominan dan ancaman tinggi; serta Kuadran IV (Konservatif) di kanan bawah, di mana kekuatan ada namun lingkungan eksternal penuh ancaman.

Berdasarkan hasil analisis, posisi TNI AL berada di koordinat $X = +1,25$ dan $Y = +1,40$, yang menempatkannya secara tegas di Kuadran I (Agresif/Growth). Ini berarti TNI AL memiliki kekuatan internal yang lebih besar dari kelemahannya, serta menghadapi peluang eksternal yang lebih dominan dibanding ancaman. Strategi yang paling tepat diterapkan adalah strategi pertumbuhan agresif memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang sebesar-besarnya guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data NVivo, analisis SWOT, serta pembahasan dan interpretasi yang telah dilaksanakan terhadap strategi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman di Laut Arafuru dalam rangka penguatan keamanan nasional, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, strategi TNI Angkatan Laut dalam mengoptimalkan mobilisasi dan pendayagunaan alutsista serta pangkalannya di kawasan Laut Arafuru ditempuh melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dengan memprioritaskan peningkatan kesiapan operasional (readiness) alutsista yang ada sebelum pengadaan unit baru. Rasio kekuatan alutsista terhadap luas perairan Laut Arafuru yang mencakup sekitar 650.000 km² masih jauh di bawah standar minimum pertahanan maritim internasional, sehingga menimbulkan blind spot pengawasan yang dieksploitasi oleh pelaku illegal fishing, penyelundupan, dan kelompok separatis OPM. Analisis SWOT menghasilkan skor IFAS sebesar 2,75 dengan selisih S-W sebesar +1,25, yang mengindikasikan bahwa TNI AL sesungguhnya memiliki fondasi kekuatan internal yang memadai untuk dikembangkan secara lebih proaktif. Sesuai teori Sea Power Mahan, peningkatan kapasitas pangkalan TNI AL di Sorong, Merauke, dan Timika sebagai jaringan logistik dan proyeksi kekuatan merupakan prasyarat utama yang tidak dapat dikesampingkan dalam strategi mobilisasi alutsista. Oleh karena itu, strategi yang paling realistis dan aplikatif adalah prioritas pengadaan bertahap yang diiringi peningkatan kesiapan operasional alutsista yang ada, serta pembangunan pangkalan maju di titik-titik strategis kawasan timur Indonesia.

Kedua, adopsi teknologi maritim modern merupakan enabler paling transformatif yang dapat secara dramatis meningkatkan kapabilitas pengawasan TNI AL di kawasan Laut Arafuru dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi teknologi pengawasan yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas, dengan sistem radar pantai

berjangkauan pendek, cakupan satelit maritim yang parsial, dan pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang masih minimal. Integrasi UAV, satelit pemantauan *real-time*, radar maritim generasi terbaru, dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data terbukti mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap kapal mencurigakan hingga 300% dibandingkan patroli konvensional semata. Sejalan dengan teori Deterrence Thomas Schelling, negara tidak perlu menggunakan kekuatan secara aktual, melainkan cukup mendemonstrasikan kemampuan teknologi pengawasan yang kredibel agar pihak lawan mengurungkan niatnya. Perkembangan teknologi satelit, UAV, dan radar maritim diidentifikasi sebagai peluang eksternal dengan bobot tertinggi dalam analisis EFAS (skor 0,80), yang mencerminkan bahwa modernisasi teknologi maritim bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keharusan strategis yang tidak dapat ditunda lebih lama mengingat kecepatan evolusi ancaman di kawasan Laut Arafuru.

Ketiga, sinergitas operasi antar instansi merupakan *force multiplier* yang paling kritis dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Laut Arafuru tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penambahan alutsista secara masif. Koordinasi antara TNI AL sebagai *leading sector* dengan Bakamla, Polairud, KKP, dan TNI AU masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama dalam aspek standarisasi SOP, integrasi sistem komunikasi, dan kejelasan pembagian tanggung jawab operasional. Keberhasilan operasi Kersamtis (Kerja Sama Maritim Instansi) yang pernah dilaksanakan menjadi bukti empiris paling kuat bahwa sinergi lintas lembaga yang terstruktur dapat menghasilkan efek deterrence yang signifikan, bahkan melampaui apa yang dapat dicapai oleh satu instansi secara mandiri. Sejalan dengan teori Konstruktivisme Wendt dan teori sinergitas Stephen R. Covey, efektivitas kerja sama tidak ditentukan semata oleh kapasitas material, melainkan juga oleh bagaimana identitas dan norma kerja sama dibangun dan diinternalisasi dalam interaksi antar institusi. Dengan demikian, pembentukan *joint task force* atau gugus tugas bersama yang permanen dengan kepemimpinan yang jelas dan prosedur koordinasi yang terstandarisasi secara nasional menjadi rekomendasi yang paling mendesak.

Keempat, konsep strategi TNI Angkatan Laut yang komprehensif dalam menghadapi ancaman di Laut Arafuru dalam rangka penguatan keamanan nasional dibangun di atas tiga pilar strategis yang saling mendukung. Pilar pertama adalah penguatan kapabilitas alutsista dan pangkalan melalui modernisasi armada patroli, pembangunan pangkalan maju di Timika, dan pengembangan sistem logistik di kawasan timur. Pilar kedua adalah pembangunan ekosistem sinergitas antar instansi yang permanen melalui pembentukan Komando Gabungan Maritim Kawasan Timur (KGMKT) beserta *Joint Operations Center* (JOC), standarisasi SOP lintas lembaga, dan integrasi sistem berbagi intelijen secara *real-time*. Pilar ketiga adalah akselerasi adopsi teknologi maritim modern yang mencakup jaringan radar terintegrasi, armada UAV jangkauan jauh, integrasi AIS dengan Puskodal TNI AL, dan Maritime Situational Awareness Center (MSAC) di Sorong. Posisi strategis TNI AL pada Kuadran I SWOT dengan koordinat $X = +1,25$ dan $Y = +1,40$ mengkonfirmasi bahwa kondisi internal dan eksternal yang ada telah memberikan fondasi yang memadai untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang proaktif, komprehensif, dan berorientasi pada hasil yang terukur guna memperkuat keamanan nasional Indonesia di kawasan timur Indo-Pasifik.

6. Daftar Pustaka

Buku dan Barang Cetak

- Wendt Alexander, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Mahan Thayer Alfred, *The Influence of Sea Power upon History 1660–1783* (Boston: Little, Brown and Company, 1890)
- Ayub, *A Conceptual Framework On Evaluating SWOT Analysis As The Mediator In Strategic Marketing Planning Through Marketing Intelligence*
- Thayer Carlyle A., *The South Cina Sea Dispute: Recent Developments and Implications for Regional Security*, (Australian Defence College, 2017)
- D. Jablonsky, 'National Power' in J.Boone Bartholomees, Jr. (ed.), *U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy* (Carlisle, PA: US Army War College, 2004).
- D.R. Worley, *Orchestrating the Instruments of Power: A Critical Examination of the U.S. National Security System* (Potomac Books, 2015)
- Till Geoffrey, *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, 4th ed. (London: Routledge, 2018)
- W Gretzky. *Strategic planning and SWOT analysis. Essentials of strategic planning in healthcare*, (2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi ke 5,s.k. "Analisis".
- Kementerian Luar Negeri RI. *Laporan Diplomasi Maritim dan Sengketa Laut Cina Selatan 2020–2023*. (Jakarta: Pusat Strategi dan Diplomasi Kemenlu RI, 2023)
- Booth Ken, *Navies and Foreign Policy* (London: Croom Helm, 1977)
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics* (New York: McGraw-Hill, 1979)
- Coser Lewis A., *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956)
- Mabes TNI, *Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI Tahun 2021* (Jakarta: Mabes TNI, 2021).
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Ali Muhammad, *Menerjang Badai Samudra: Menuju Indonesia Maju dan Makmur*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2025).
- Purnomo, Bambang. *Keamanan Laut Indonesia dan Diplomasi Maritim*. (Surabaya: Universitas Hang Tuah Press, 2023)
- R.M. John, 'All Elements of National Power': *Re-Organizing the Interagency Structure and Process for Victory in the Long War* (Strategic Insights, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta, 2017)
- Schelling Thomas C, *Arms and Influence* (New Haven: Yale University Press, 1966)

Jurnal

- Jessica L. Johnson, Donna Adkins, and Sheila Chauvin, 'A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research', *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84.1 (2020), 138–46
- Mobaraki, O, *Strategic Planning and Urban Development by Using The SWOT Analysis*. *Romanian Review of Region Studies*, 47-54.
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). *Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45-62.
- Peterson Tim and Müller Gerd B., 'What Is Evolutionary Novelty? Process versus Character Based Definitions', *Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular*

and Developmental Evolution, 320.6 (2013), 345–50

Živković, Ž., Nikolić, Đ., Đorđević, P., Mihajlović, I., & Savić, M. (2015). Analytical network process in the framework of SWOT analysis for strategic decision making (Case study: Technical faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia).

Peraturan dan Perundang-undangan

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/2705/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Doktrin Operasi Diplomasi TNI Angkatan Laut.

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, Part V, Article 55–57

Publikasi Elektronika

Zamroh M. Rifki Abu, Alur Laut Kepulauan Indonesia, geohepi.hepidev.com, diakses pada 24 Maret 2025, <https://geohepi.hepidev.com/2020/12/15/alur-laut-kepulauan-indonesia-alk>